PURBAWIDYA
p-ISSN: 2252-3758, e-ISSN: 2528-3618 ■ Terakreditasi SINTA 2
berdasarkan SK Dirjen Riset dan Pengembangan KEMENDIKTISAINTEK Nomor: 10/C/C3/DT.05.00/2025
Vol. 15 (2), November 2026, pp 479 – 499 ■ DOI: https://doi.org/10.55981/purbawidya.2026.14693
© 2026 Author (s) Published by Penerbit BRIN,
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

DINAMIKA REFORMASI POLITIK LOKAL: KONTESTASI ELITE DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN, 1998 – 2000

The Dynamics of Local Political Reform: Elite Contestation in the Formation of Banten Province, 1998 – 2000

Suci Fitri Setiarini[1*)], Singgih Tri Sulistiyono[2)], dan Haryono Rinardi[2)]

[1] Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jalan Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang 50275, Indonesia
[2] Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jalan Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang 50275, Indonesia
**Pos-el: sucifitrisetiarini3@gmail.com (Corresponding Author)*

Naskah diterima: 15 Januari 2026 - Revisi terakhir: 22 Juni 2026
Disetujui terbit: 24 Juli 2026 - Terbit: 11 November 2026

Abstract

This article examines the turning point in the formation of Banten Province within the context of the 1998 Reformasi as part of the dynamics of local political history in post–New Order Indonesia. It employs the historical method, encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, to trace the long process leading to Banten's emergence as a new administrative entity. The formation of Banten Province originated from demands for regional division driven by identity differences between the Bantenese and the Sundanese of Priangan, uneven development, and regional marginalization within the governmental structure of West Java since the Old Order era. However, the 1998 Reformasi opened broader political space, enabling previously constrained aspirations to be articulated in a more organized and open manner. In subsequent developments, the process was shaped by elite contestation at local and regional levels, as well as negotiations with the central government. Civil society consolidation, the strategic role of local elites, and the shift of the struggle into the national political arena also played significant roles in shaping the process. The findings show that the formation of Banten Province was not merely an administrative process, but rather the result of interactions between bottom-up social pressures and elite political strategies in utilizing opportunities during the Reformasi transition. Therefore, regional division can be understood as a reflection of changes in Indonesia's power structure and political configuration.

***Keywords*:** Reformasi 1998*; regional expansion; elite contestation; Banten Province*

Abstrak

Artikel ini mengkaji titik balik pembentukan Provinsi Banten dalam konteks Reformasi 1998 sebagai bagian dari dinamika sejarah politik lokal di Indonesia pasca-Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menelusuri proses panjang yang

melatarbelakangi lahirnya Provinsi Banten sebagai entitas administratif baru. Lahirnya Provinsi Banten dimulai dari munculnya aspirasi pemekaran sebagai respons terhadap perbedaan identitas antara orang Banten dan orang sunda Priangan, ketimpangan pembangunan, serta marginalisasi wilayah dalam struktur pemerintahan Provinsi Jawa Barat sejak masa Orde Lama. Namun, momentum Reformasi 1998 membuka ruang politik lebih luas, titik balik itu memungkinkan artikulasi aspirasi lama yang sempat tertunda menjadi terorganisasi dan lebih terbuka. Dalam perkembangan lebih lanjut, proses pembentukan Provinsi Banten diwarnai oleh dinamika kontestasi antar-elite, baik di tingkat lokal maupun regional, dan negosiasi dengan pemerintah pusat. Berbagai konsolidasi masyarakat sipil, peran strategis elite lokal, keberhasilan mengalihkan arena perjuangan ke tingkat politik nasional, serta ikut memainkan peran dalam membentuk jalannya proses tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Banten tidak semata-mata merupakan proses administratif. Proses tersebut merupakan hasil interaksi antara tekanan sosial dari bawah dan strategi politik elite dalam memanfaatkan peluang pada masa transisi Reformasi. Oleh karena itu, pemekaran wilayah dapat dipahami sebagai refleksi perubahan struktur kekuasaan dan konfigurasi politik di Indonesia.

Kata kunci: Reformasi 1998; pemekaran daerah; kontestasi elite; Provinsi Banten

PENDAHULUAN

Lokalitas Banten tidak dapat dipahami semata-mata sebagai identitas budaya, tetapi berakar pada pengalaman historis sebagai entitas politik yang pernah memiliki posisi strategis sejak masa Kesultanan Banten, yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai kemandirian politik (Supriatna dan Ilyas, 1999). Pengalaman historis tersebut kemudian berlanjut pada masa awal kemerdekaan, ketika aspirasi untuk membentuk provinsi sendiri mulai berkembang sejak tahun 1953 sebagai respons terhadap integrasi Banten ke Provinsi Jawa Barat yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan daerah (Lubis dkk., 2014: 277). Aspirasi tersebut diwujudkan melalui langkah konkret dengan pembentukan Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPB) pada 1963, yang menunjukkan adanya upaya terorganisasi untuk memperjuangkan otonomi daerah (Lubis dkk., 2014: 281). Namun, dinamika politik nasional pasca-1965 mengubah arah gerakan tersebut, ketika isu pembentukan Provinsi Banten dituding sebagai bagian dari pola gerakan PKI, sehingga memunculkan kecurigaan politik yang berdampak langsung pada melemahnya legitimasi gerakan di tingkat publik (Mansur, 2001: 89-90).

Dalam perkembangan berikutnya, tekanan politik negara semakin menguat melalui pembentukan opini publik dan pendekatan keamanan, yang tercermin dari munculnya penolakan sebagian organisasi pemuda di Pandeglang pada 1970 serta tidak adanya dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat terhadap usulan pemekaran (Sudirman, 1968: 2). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejak akhir 1960-an hingga masa Orde Baru, tuntutan pembentukan Provinsi Banten tidak hilang, tetapi mengalami pembekuan akibat kuatnya kontrol negara melalui pengendalian wacana, pembatasan partisipasi politik, dan sentralisasi kebijakan. Dalam situasi itu, aspirasi pemekaran tetap bertahan

sebagai kesadaran yang terpendam di tingkat masyarakat, meskipun tidak memiliki ruang politik untuk diekspresikan secara terbuka. Perubahan baru terjadi ketika krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap negara, disertai praktik kekuasaan yang tertutup dan korupsi, sehingga memperlemah legitimasi pemerintahan Orde Baru (Suparno, 2012: 5).

Berkaitan dengan konteks tersebut, gelombang Reformasi 1998 membuka kembali ruang politik yang sebelumnya tertutup, sehingga berbagai kelompok masyarakat dapat mengartikulasikan tuntutan secara lebih terbuka. Tekanan ekonomi dan sosial yang meluas mendorong keterlibatan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat luas, dalam menyuarakan perubahan yang difokuskan pada pembenahan ekonomi, penghapusan KKN (Korupsi Kolusi Nopotisme), dan demokratisasi politik (Bali Post, 1998: 5). Dengan terbukanya peluang politik itu, aspirasi pembentukan Provinsi Banten yang sebelumnya dibekukan kembali menemukan momentumnya, sehingga Reformasi 1998 tidak menjadi titik awal, melainkan menjadi fase penting dalam mengaktualisasikan tuntutan yang telah berkembang secara historis.

Masyarakat Banten kemudian menemukan peluang emas untuk menghidupkan kembali perjuangan lama. Berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, ulama, tokoh masyarakat, dan jawara bersatu dalam mendorong pembentukan Provinsi Banten. Gerakan itu tidak hanya ditopang oleh semangat lokal, tetapi juga terbantu oleh perubahan kebijakan nasional yang lebih akomodatif terhadap pemekaran wilayah. Dalam momen yang "membakar semangat perjuangan" pembentukan Provinsi Banten itu, berbagai organisasi lokal seperti Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB) dan Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB) yang selanjutnya ditulis KPPB dan Pokja-PPB muncul sebagai wadah perjuangan. Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Di tengah semangat yang menyala, muncul pula konflik internal antar kelompok elite Banten, yaitu antara pimpinan Pokja-PPB dan pimpinan KPPB yang memiliki pandangan berbeda mengenai strategi dan kepemimpinan. Masing-masing dari mereka mengklaim sebagai satu-satunya representasi sah dari aspirasi pembentukan Provinsi Banten. Konflik eksternal juga terjadi, seperti resistensi dari elite Jawa Barat yang juga turut menjadi batu sandungan. Mereka memandang pemisahan Banten sebagai ancaman terhadap kepentingan politik dan ekonomi wilayah induk (Mardhotillah, 2016: 60). Hal itu muncul karena pandangan bahwa pemekaran Banten tidak hanya berarti lahirnya daerah otonom baru, tetapi juga berimplikasi langsung pada berkurangnya wilayah, kewenangan, dan pengaruh politik Jawa Barat sebagai provinsi induk.

Dengan berbagai kondisi yang terjadi di wilayah Banten pada waktu itu, pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie (Presiden RI ke-3) tetap memberikan respons yang lebih terbuka terhadap berbagai aspirasi daerah. Dalam konteks itu, reformasi bukan sekadar latar waktu, tetapi menjadi katalis penting bagi terwujudnya Provinsi Banten sebagai entitas administratif baru (Ribawati dkk., 2023: 121). Momentum itu berhasil menyatukan kekuatan lokal dalam satu visi bersama untuk keluar dari bayang-bayang dominasi Jawa Barat dan memperjuangkan otonomi yang lebih berkeadilan. Penelusuran sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Banten menjadi

penting untuk memahami relasi antara reformasi nasional dan dinamika politik lokal dapat melahirkan entitas baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Melalui pendekatan sejarah politik, penelitian ini menjelaskan bahwa proses pembentukan Provinsi Banten pada masa Reformasi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan lahir dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara perubahan politik nasional dan dinamika kekuatan di tingkat lokal. Ketika Reformasi membuka ruang kebebasan politik, berbagai aktor di Banten mulai bergerak, sehingga muncul interaksi yang intens antara organisasi penggerak, relasi sosial masyarakat, serta jaringan elite yang terlibat di tingkat daerah dan pusat. Untuk memahami proses tersebut secara lebih tajam, penelitian ini menggunakan teori elite sebagai alat analisis. Teori elite menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat cenderung dikuasai oleh kelompok kecil yang terorganisasi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca bahwa elite memiliki akses terhadap sumber daya politik dan mempertahankan dominasinya melalui berbagai bentuk legitimasi seperti kebijakan dan ideologi (Toscano & Stolz, 2025: 347-348). Untuk memahami dinamika antar-aktor, pendekatan C. Wright Mills digunakan secara terbatas dengan melihat bahwa elite tidak hanya sebagai kelompok, tetapi juga sebagai aktor yang saling terhubung dalam relasi kekuasaan. Namun, kajian Mark S. Mizruchi menunjukkan bahwa pola tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku karena perubahan historis telah melemahkan kohesi elite dan membuatnya lebih terfragmentasi serta kompetitif (Mizruchi, 2017: 112-114).

Dalam konteks pembentukan Provinsi Banten pada masa Reformasi, teori elite membantu menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Banten tidak hanya digerakkan oleh tuntutan masyarakat, tetapi juga sangat ditentukan oleh tindakan para elite dalam memanfaatkan posisi dan jaringan mereka untuk memengaruhi keputusan politik. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada peristiwa, tetapi menelusuri para tokoh yang berperan, perilaku dan tindakan mereka dalam berinteraksi, serta alasan mereka bertindak. Dari kerangka tersebut, penelitian ini kemudian menggunakan dua konsep turunan. Pertama, kontestasi elite, yaitu persaingan antar individu dan kelompok dalam memperebutkan posisi strategis yang memberi akses terhadap kekuasaan dan patronase (Chipkin & Vidojević, 2025: 647). Ketika peluang Reformasi terbuka, para elite lokal, regional, dan pusat saling berkompetisi untuk memperoleh legitimasi sebagai aktor utama dalam proses pemekaran. Akibatnya, pembentukan Provinsi Banten tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan yang berlangsung secara terbuka maupun terselubung. Kedua, konsep peluang politik merujuk pada kondisi sistem politik yang membuka atau membatasi kesempatan bagi aktor untuk melakukan tindakan politik, terutama ketika terjadi perubahan dalam keterbukaan sistem politik dan pembagian kekuasaan (Jami & Peoples, 2022: 16-17). Dalam konteks Reformasi 1998, kondisi ini menciptakan ruang bagi elite untuk memanfaatkan peluang tersebut, sehingga memperkuat dinamika kontestasi dalam proses pembentukan Provinsi Banten. Oleh karena itu, peluang politik tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga menjadi faktor yang mendorong intensitas kontestasi antar-elite.

Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dinamika interaksi dan relasi antar-aktor yang memanfaatkan peluang politik Reformasi selama proses pembentukan Provinsi Banten. Fokus ini penting karena memperlihatkan bagaimana perubahan struktur politik menghasilkan persaingan baru yang menentukan arah pembentukan institusi daerah. Dengan demikian, pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana dinamika kontestasi elite berlangsung dalam proses pembentukan Provinsi Banten pada periode 1998–2000?

State of the art disajikan untuk mengkritisi literatur-literatur terdahulu yang monumental mengenai pembentukan Provinsi Banten, beberapa diantaranya Lubis dkk. (2014) dalam bukunya *Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban*. Pembahasan buku itu menelusuri akar historis identitas masyarakat Banten dari masa pra-Islam hingga era modern. Selain itu, dalam buku ini juga menunjukkan nilai-nilai lokal serta tradisi perlawanan terhadap kekuasaan pusat membentuk semangat otonomi daerah yang kuat, sehingga buku itu menjadi landasan awal dalam memahami latar belakang sosial budaya terbentuknya Provinsi Banten. Kajian lain ditulis oleh Hidayat (2007) dalam artikel *'Shadow State'? Business and Politics in The Province of Banten* yang mengkaji mengenai kekuasaan di Banten tidak hanya dijalankan secara formal melalui institusi negara, tetapi juga melalui jaringan informal seperti patronase dan kolusi elite politik, terutama peran Haji Tubagus Chasan Sochib sebagai aktor utama dalam pembentukan provinsi dan pembangunan dinasti politik lokal. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai elite lokal yang berupaya untuk menguasai sumber daya politik dan ekonomi. Sementara itu, Rohmah (2018) dalam artikelnya *Elite dan Pemekaran Daerah: Konflik Antar Elite dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten* menyoroti konflik antara elite lokal Banten, elite Jawa Barat, dan aktor nasional dalam proses pembentukan provinsi, serta menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya didorong oleh aspirasi masyarakat, tetapi juga merupakan hasil dari negosiasi dan strategi politik di antara para aktor. Ketiga kajian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Banten merupakan hasil dari proses historis, dinamika sosial-politik, dan pertarungan kepentingan para elite, namun belum ada yang secara khusus menelaah kontestasi elite dalam konteks Reformasi politik lokal selama proses pembentukan Provinsi Banten tahun 1998—2000, sehingga hal itu menjadi novelty dalam penelitian ini. Reformasi 1998 menjadi tahap awal batasan temporal penelitian ini karena menunjukkan titik balik dalam proses pembentukan Provinsi Banten. Batas akhir temporal penelitian ini pada tahun 2000 karena pada saat itu Provinsi Banten resmi terbentuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang diartikan sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975: 32). Dalam praktiknya, metode sejarah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik merupakan tahap awal dalam metode sejarah yang berfungsi untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan topik kajian. Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber sejarah dalam konteks ini mengacu pada segala bentuk informasi atau bukti yang memiliki nilai historis terkait peristiwa masa lalu (Pranoto, 2014: 29). Dalam konteks penelitian ini, peneliti menelusuri berbagai sumber primer dan sekunder, baik berupa fisik maupun digital. Penelusuran sumber dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lembaga, seperti Perpustakaan Departemen Sejarah Universitas Diponegoro, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, serta kantor redaksi surat kabar *Kompas*. Peneliti mengakses arsip berupa buku laporan kegiatan dan kliping koran. Selain itu, pencarian juga dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal online dan situs resmi pemerintah. Pemanfaatan sumber digital itu bertujuan untuk melengkapi data yang tidak tersedia secara fisik. Dengan demikian, tahap heuristik menjadi fondasi penting dalam merangkai narasi sejarah yang utuh dan berimbang.

Tahap kedua dalam metode sejarah adalah kritik sumber yang dilakukan untuk menilai keaslian dan keakuratan informasi. Kritik ini terbagi menjadi dua, yakni ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan memastikan keaslian fisik dokumen. Hal itu menjadi penting agar peneliti tidak tertipu oleh sumber palsu. Sementara itu, kritik intern lebih fokus pada isi sumber (Gottschalk, 1975: 97). Dalam penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada kritik intern, karena fokus utamanya adalah menganalisis isi dan makna dari berbagai dokumen, termasuk artikel berita, wawancara, dan tulisan tentang tokoh. Terkait kritik sumber digital, peneliti menilai kredibilitas berdasarkan asal situs dan konsistensi isi dengan sumber-sumber lain. Melalui proses tersebut, kritik intern berperan dalam menyaring dan menghubungkan berbagai informasi yang tersebar dalam sumber yang berbeda, sehingga peneliti dapat membedakan antara fakta, interpretasi, dan kepentingan yang melekat dalam setiap sumber. Proses itu memungkinkan terbentuknya pemahaman yang lebih terarah terhadap dinamika kontestasi elite, karena setiap data diuji keterkaitannya dalam konteks peristiwa.

Tahap ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi, yaitu proses memahami makna dari hubungan antar fakta yang ditemukan. Penafsiran ini bersifat subjektif, namun tetap harus mengikuti kaidah metodologi sejarah. Interpretasi dilakukan melalui dua cara, yakni analisis untuk menguraikan data secara rinci, dan sintesis untuk menggabungkan data menjadi satu kesatuan yang utuh guna menarik kesimpulan yang logis dan relevan. Melalui sintesis, data yang tersebar disusun kembali dalam kerangka yang sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang menjelaskan hubungan antara perubahan struktur politik Reformasi dengan munculnya kontestasi elite dalam pembentukan Provinsi Banten (Pranoto, 2014: 56).

Tahap akhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yakni proses menyusun dan menuliskan hasil penelitian sejarah ke dalam narasi yang utuh dan bermakna (Herlina, 2020: 29-30). Dalam konteks artikel ini, imajinasi sejarawan dibutuhkan untuk menjembatani kekosongan data, namun tetap harus berpijak pada logika, fakta, dan konteks sosial (Gottschalk, 1975: 33). Artinya, penulisan sejarah tidak sekadar merangkai

fakta, tapi juga menghadirkan kembali masa lalu secara masuk akal dan manusiawi, tanpa kehilangan integritas ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memperoleh informasi mengenai faktor yang menjadikan reformasi sebagai momentum pembentukan Provinsi Banten serta perjuangan tokoh dan masyarakat Banten dalam upaya melepaskan diri dari provinsi induknya, yakni Jawa Barat.

Reformasi sebagai Titik Balik Perjuangan Pembentukan Provinsi Banten

Pengalaman masyarakat Banten dalam menjalankan pemerintahan daerah pada masa revolusi kemerdekaan memperkuat keyakinan bahwa wilayah ini memiliki kemampuan untuk berdiri secara mandiri. Dalam situasi blokade Belanda pada akhir 1940-an, pemerintahan daerah di Banten bahkan pernah menerbitkan mata uang sendiri yang dikenal sebagai Oeang Republik Indonesia Daerah Banten (OeRIDaB) dengan tanda tangan Residen Banten, Kiai Achmad Chatib (Mansur, 2001: 92). Pengalaman tersebut kemudian melahirkan kesadaran politik di kalangan elite lokal bahwa Banten memiliki kapasitas historis, administratif, dan sosial untuk memperoleh status daerah tersendiri. Kesadaran itu mulai diwujudkan secara lebih terbuka pada 1953 ketika Kiai Achmad Chatib bersama sejumlah tokoh lain seperti Sjech Ibrahim, Enjeng Jaenudin, K.H. Tb. Idrus, dan K.H. Mahmud mengemukakan gagasan pembentukan daerah istimewa atau provinsi tersendiri bagi Banten (Mulyana & dkk, 2009: 15). Upaya tersebut mencapai tahap yang lebih terorganisasi pada 1963 melalui pembentukan Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPB) yang menghimpun tokoh agama, pejabat daerah, dan unsur politik lokal (Mansur, 2001: 93). Namun, dinamika politik nasional pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan perjuangan itu harus menyesuaikan diri dengan konfigurasi politik Nasakom, sehingga unsur Partai Komunis Indonesia (PKI) turut dimasukkan ke dalam kepanitiaan PPB melalui tokoh Sukra dan Toha dari DPRD-GR Serang (Lubis dkk., 2014: 281). Meskipun keterlibatan PKI tidak menempati posisi dominan, situasi politik pasca-Gerakan 30 September 1965 membuat hubungan tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk membangun kecurigaan bahwa gerakan pembentukan Provinsi Banten berkaitan dengan kepentingan PKI (Berita Yudha, 1994: 4). Dalam konteks itu, negara mulai memandang aspirasi pemekaran bukan lagi sebagai tuntutan administratif daerah, melainkan sebagai persoalan keamanan politik. Akibatnya, pemerintah dan militer melakukan pengendalian yang semakin kuat melalui pendekatan keamanan, pembentukan opini publik, serta pembatasan ruang politik daerah (Mansur, 2001: 90). Tekanan tersebut terlihat dari tidak adanya dukungan penuh DPRD Jawa Barat terhadap usulan pembentukan Provinsi Banten, munculnya penolakan dari sejumlah organisasi pemuda di Pandeglang pada 1970 (Ant, 1970: 2), serta semakin kuatnya dominasi negara dalam mengendalikan wacana politik lokal (Sudirman, 1968: 2). Kondisi itu menyebabkan perjuangan pembentukan Provinsi Banten mengalami stagnasi sepanjang masa Orde Baru.

Transformasi era Reformasi 1998 menjadi titik balik perubahan struktur politik Indonesia dari sistem yang sentralistik menuju pola pemerintahan yang lebih terbuka dan desentralistik. Kondisi itu menyebabkan aspirasi pembentukan Provinsi Banten tetap bertahan, tetapi bergerak dalam ruang politik yang sempit dan cenderung ditekan melalui pendekatan keamanan. Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis legitimasi politik pada akhir Orde Baru kemudian mempercepat runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998 (Bali Post, 1998: 11), sekaligus mengakhiri pola sentralisasi politik yang membatasi partisipasi masyarakat dan elite lokal dalam menentukan arah politik daerah. Kegagalan ekonomi, praktik kekuasaan yang tertutup, serta maraknya korupsi semakin memperdalam krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru (Suparno, 2012: 3).

Perubahan struktur politik pasca-Reformasi semakin diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan membuka ruang desentralisasi politik (UU No. 22 Tahun 1999). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mulai mengubah pendekatan hubungan pusat dengan daerah dari pola sentralistik menuju distribusi kewenangan yang lebih terbuka. Dalam konteks ini, tuntutan pembentukan Provinsi Banten yang sebelumnya mengalami kebuntuan politik memperoleh peluang baru untuk kembali diangkat ke ruang publik dan arena politik nasional. Perubahan itu sekaligus menciptakan *political opportunity* bagi berbagai aktor lokal, mulai dari mahasiswa, ulama, tokoh masyarakat, hingga elite politik daerah untuk membangun konsolidasi gerakan dan memperjuangkan kembali aspirasi pemekaran wilayah melalui jalur konstitusional.

Atmosfer politik yang lebih terbuka setelah Reformasi membuat masyarakat Banten semakin aktif membangun jaringan politik dengan pemerintah pusat. Sebagai bentuk respons terhadap perubahan tersebut, pada 22 Mei 1998 atau sehari setelah lengsernya Soeharto, ribuan masyarakat Banten yang dipimpin H. Embay Mulya Syarif mendatangi Senayan untuk menyatakan dukungan terhadap pemerintahan B.J. Habibie guna menjaga stabilitas politik nasional di tengah situasi transisi kekuasaan (Mansur, 2001: 124). Menurut Embay Mulya Syarief, dukungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik nasional, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat agar aspirasi pembentukan Provinsi Banten memperoleh perhatian Negara.[1] Dukungan itu tidak hanya menunjukkan keterlibatan masyarakat Banten dalam agenda nasional pasca-Reformasi, tetapi juga menjadi strategi politik untuk membangun kedekatan dengan elite pusat agar tuntutan pembentukan Provinsi Banten memperoleh legitimasi politik. Seiring dengan itu, jaringan aktivis dan tokoh Banten mulai melakukan konsolidasi secara lebih terbuka setelah Reformasi karena situasi politik nasional tidak lagi seketat masa Orde Baru. Reformasi memberi peluang bagi masyarakat Banten untuk membawa kembali isu pembentukan provinsi ke tingkat nasional melalui pendekatan politik, mobilisasi massa, dan komunikasi dengan elite

[1](Embay Mulya Syarief, 73 Tahun, Tokoh Lokal Banten, 20 Februari 2026)

pemerintahan pusat.[2] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan politik nasional pasca tragedi 1998 dimanfaatkan oleh aktor lokal Banten untuk membangun legitimasi politik dan memperluas dukungan terhadap agenda pembentukan provinsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsolidasi tersebut terus berlanjut melalui pertemuan H. Embay Mulya Syarif dan sejumlah tokoh Banten dengan pihak Istana Negara menjelang kunjungan Presiden B.J. Habibie (Presiden RI ke-3) ke Pondok Pesantren Darul Iman, Pandeglang, pada Februari 1999. Momentum itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Banten untuk menyampaikan kembali aspirasi pembentukan provinsi secara langsung kepada Presiden (Lubis dkk., 2014: 295). Embay Mulya Syarief menjelaskan bahwa kunjungan tersebut sengaja dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi politik untuk mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Banten, termasuk melalui pembahasan administratif dan politik di tingkat nasional.[3] Strategi tersebut memperlihatkan bahwa gerakan pembentukan Provinsi Banten pasca-Reformasi menggunakan pendekatan diplomasi politik dengan elite pusat untuk memperkuat legitimasi perjuangan daerah.

Dengan demikian, Reformasi tidak hanya menghadirkan perubahan rezim politik, tetapi juga mengubah struktur hubungan antara negara dengan daerah. Jika pada masa Orde Baru negara menjadi aktor dominan yang membatasi ruang gerak politik lokal, maka pasca-1998 muncul situasi multi-aktor yang memungkinkan masyarakat, mahasiswa, ulama, dan elite lokal terlibat lebih aktif dalam proses politik. Perubahan struktur tersebut membuat tuntutan pembentukan Provinsi Banten yang sebelumnya terhambat mulai memperoleh legitimasi hukum dan dukungan politik yang lebih luas. Proses itu akhirnya mencapai bentuk formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten yang menandai keberhasilan transformasi aspirasi lokal menjadi kebijakan negara (UU No. 23 Tahun 2000).

Faktor Penggerak Semangat Lokal dalam Perjuangan Pembentukan Provinsi Banten

Setelah lebih dari dua dekade tanpa kemajuan berarti, masyarakat Banten kembali membangun gerakan kolektif. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam kehidupan politik Indonesia, khususnya dalam membuka ruang kebebasan berekspresi yang selama ini ditekan oleh rezim otoriter Orde Baru. Sebelum reformasi, masyarakat hidup dalam ketakutan untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Namun setelah reformasi bergulir, semangat rakyat untuk kembali bersuara tumbuh dengan kuat di berbagai daerah, termasuk di Banten. Momentum reformasi dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali aspirasi lama yang terpendam, yakni keinginan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk provinsi sendiri. Aspirasi ini tidak hanya datang dari kalangan elite lokal, tetapi juga didorong oleh partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga para pemuda Banten yang menyuarakan semangat kedaerahan

[2](Makmun Muzakki, 61 Tahun, Koordinator Lapangan Pasukan Pengaman Swakarsa, 23 Februari 2026)
[3](Embay Mulya Syarief, 73 Tahun, Tokoh Lokal Banten, 20 Februari 2026)

dan otonomi. Dengan demikian, reformasi tidak hanya membawa perubahan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi landasan kebangkitan gerakan daerah seperti yang terjadi di Banten. Di sisi lain, pemerintah pusat pasca-reformasi mulai mengadopsi kebijakan desentralisasi dan pemekaran wilayah. Pembentukan tiga provinsi di Irian Jaya dan dua provinsi di Maluku memberikan sinyal bahwa ruang terbuka lebar bagi daerah lain untuk mengajukan aspirasi serupa, termasuk Banten (Mansur, 2001: 124). Situasi itu memperkuat kembali dorongan masyarakat Banten untuk menuntut otonomi, seiring terbukanya ruang demokrasi.

Salah satu faktor yang menggerakkan semangat perjuangan masyarakat Banten adalah kesadaran kolektif terhadap ketimpangan pembangunan yang mereka alami selama berada di bawah administrasi Provinsi Jawa Barat. Aspirasi tersebut tidak sekadar berasal dari elite politik, melainkan tumbuh dari realitas sehari-hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti dilaporkan oleh harian *Kompas*, keluhan masyarakat terhadap infrastruktur yang terbengkalai menjadi salah satu indikator nyata. Sarman, warga Desa Cibareno, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, mengungkapkan harapannya agar jalan penghubung vital Bayah–Cibareno segera diperbaiki karena merupakan urat nadi perekonomian desanya. “Jangan daerah kami dibiarkan seperti ini,” keluhnya sambil menunjuk jalan yang rusak (Suganda, 1999: 023). Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa semangat perjuangan tidak semata dilandasi wacana politik, melainkan tumbuh dari pengalaman langsung atas ketidakadilan pembangunan.

Ketimpangan pembangunan yang dirasakan di wilayah Banten Selatan menjadi simbol dari nasib masyarakat Banten secara keseluruhan. Dalam era reformasi yang menjanjikan keterbukaan dan keadilan, serta ketidakmerataan pembangunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi semakin mencolok. Maka tidak mengherankan jika dorongan untuk membentuk Provinsi Banten semakin menguat dari berbagai kalangan. Ulama-ulama setempat bahkan menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden B.J. Habibie (Presiden ke-3) saat kunjungannya ke Banten. Dukungan pun datang dari kalangan pemuda dan mahasiswa seperti Ikatan Keluarga Mahasiswa Banten (IKMB), serta organisasi kebudayaan lokal seperti Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia. Sekretaris Jenderalnya, HM Kasmiri Assabdu, menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada budaya lokal. “Pembangunan Banten harus didekati secara budaya Banten,” ungkapnya (Suganda, 1999: 023). Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Banten tidak hanya menyangkut soal administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan identitas dan harga diri masyarakatnya.

Ketimpangan lainnya yang dirasakan yakni dalam sektor pembangunan antara Banten dan wilayah Priangan menjadi pemicu semangat pemekaran. Masyarakat Banten menilai bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memprioritaskan wilayah asal para pejabat di Priangan, seperti Bandung dan Tasikmalaya, sementara daerah-daerah seperti Serang, Lebak, dan Pandeglang terabaikan. Letak geografis Banten yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi di Bandung turut memperburuk keadaan. Warga merasa lebih dekat secara akses ke Jakarta ketimbang ke Bandung, sehingga pembangunan pun

menjadi tidak merata. Kondisi ini melahirkan persepsi bahwa Banten hanyalah "anak tiri" dalam pembangunan Jawa Barat. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka kemiskinan dan jumlah desa tertinggal di wilayah tersebut. Ketimpangan ini juga tercermin dalam sektor pariwisata. Meski Banten memiliki potensi besar seperti Pantai Anyer dan Taman Nasional Ujung Kulon, perhatian pemerintah provinsi terhadap promosi dan pengelolaannya sangat minim dan tidak konsisten (Karim, 1999: 016). Realitas ini memperkuat tuntutan agar Banten memiliki kendali sendiri atas pembangunan daerahnya.

Narasi kuat lain yang mendasari semangat pemekaran adalah kekhawatiran bahwa Banten akan semakin terpinggirkan secara politik, administratif, dan ekonomi jika tetap berada dalam struktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ungkapan "Banten kelak hanya tinggal sebuah desa kecil," yang disampaikan oleh Pembantu Gubernur Wilayah I Banten, Momon Gandasasmita, mencerminkan kecemasan mendalam atas masa depan Banten pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menghapus hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga peran koordinatif provinsi menjadi terbatas. Dalam hal itu, posisi Banten yang sebelumnya strategis bisa merosot menjadi entitas administratif biasa tanpa kekuatan tawar. Lebih jauh, daerah-daerah lemah seperti Lebak dan Pandeglang berisiko semakin tertinggal tanpa adanya dukungan langsung dari pemerintah provinsi. Makna "desa kecil" juga menyiratkan narasi historis yang dalam. Sebutan itu mengacu pada Banten Lama, wilayah yang dahulu menjadi pusat kejayaan Kesultanan Banten, tetapi hanya menyisakan puing-puing kejayaan masa silam akibat kolonialisme Belanda (Suganda, 1999a: 024). Oleh karena itu, pemekaran bukan hanya soal keluar dari ketimpangan, tetapi juga upaya untuk mengembalikan peran historis dan strategis Banten dalam peta nasional.

Ketegangan Internal antar Elite Lokal: Persaingan antar Pokja PPB dan KPPB

Dalam proses menuju pembentukan Provinsi Banten, dinamika internal antar elite lokal kerap diwarnai oleh perbedaan strategi dan kepemimpinan. Situasi ini terlihat jelas pada hubungan antara dua organisasi besar, yakni Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB) yang berdiri pada 18 Juli 1999 dan Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB) yang dibentuk pada 1 Agustus 1999 (Lubis dkk., 2014: 297-300). Kedua ketuanya sama-sama berasal dari Rangkasbitung, namun perbedaan visi dan pendekatan memicu ketidakcocokan di tingkat kepemimpinan (Mansur, 2001: 152).

K.H. Irsyad Djuwaeli merupakan tokoh yang berperan penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR-MPR RI sekaligus Ketua Mathla'ul Anwar Banten, turut hadir dalam pertemuan silaturahmi GPRI Serang dengan anggota DPR/MPR-RI asal Banten di Gedung Kopri Serang pada 4 Juni 1999. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk terus menggulirkan perjuangan pembentukan Provinsi Banten (Supardi, 2002: 36 dalam Lubis dkk., 2014: 297). Kesepakatan itu kemudian menjadi pijakan penting bagi konsolidasi kekuatan lokal, yang nantinya diwujudkan melalui pembentukan Pokja-PPB sebagai wadah koordinasi resmi perjuangan. Namun, dinamika politik daerah yang semakin terbuka pada masa

Reformasi juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif serupa di luar Pokja-PPB, termasuk KPPB, yang membawa pendekatan dan strategi berbeda. Keberadaan inisiatif-inisiatif baru itu mencerminkan semakin luasnya partisipasi aktor lokal dalam mengartikulasikan aspirasi pembentukan provinsi, meskipun berpotensi memunculkan persaingan antarorganisasi. Dengan demikian, terbentuklah KPPB yang dipimpin oleh H. Uwes Qorny pada pertengahan Juli 1999. Upaya pertama kali yang dilakukan oleh KPPB dalam memperjuangan pembentukan Provinsi Banten, yakni menggelar Rapat Akbar di Alun-Alun Barat Kota Serang dan mendeklarasikan Deklarasi Rakyat Banten 1999 yang ditandatangani oleh 30 tokoh Banten (Mansur, 2001: 174-176).

Momentum perjuangan pembentukan Provinsi Banten semakin menguat ketika diselenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Mempertegas Proyeksi Terwujudnya Provinsi Banten" di Hotel Patra Jasa, Anyer pada 1 Agustus 1999. Forum strategis itu mempertemukan berbagai tokoh penting, di antaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, anggota DPR-RI Ekky Syahruddin, Ketua PB Mathla'ul Anwar Irsyad Djuwaeli, Ketua STAIN SMHB H.M.A. Tihami, Kepala Humas Depdagri Herman Ibrahim dan Ir. Raden Gunawan, M.Eng. Masing-masing pembicara memaparkan pandangan dari perspektif keahliannya, namun seluruhnya bersepakat bahwa secara historis, kultural, dan administratif, Provinsi Banten memiliki kelayakan untuk diwujudkan. Salah satu capaian krusial dari seminar yang dihadiri banyak tokoh masyarakat Banten adalah pengesahan Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB) sebagai wadah resmi perjuangan. Struktur kepengurusan Pokja-PPB menetapkan Irsyad Djuwaeli sebagai ketua, Rusli Ridwan sebagai sekretaris umum, dan R. Gunawan sebagai bendahara (Mansur, 2001: 134-135). Berdasarkan gagasannya, dibentuklah Pokja-PPB yang beranggotakan sejumlah tokoh masyarakat dan berfokus pada perencanaan strategis pembentukan provinsi.

Sebagai wujud konkret dari semangat perjuangan, terdapat suatu golongan yang juga ingin menunjukkan diri dengan melakukan dideklarasikan Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB) di Pandeglang pada 11 September 1999. Acara tersebut dihadiri lebih dari 2.000 warga dari berbagai elemen masyarakat (YNS, 1999: 15). Deklarasi itu bukan sekadar simbolis, tetapi menunjukkan adanya konsolidasi kekuatan dari tokoh agama, politik, dan masyarakat sipil. Pembentukan KPPB didorong oleh pertemuan antara perwakilan masyarakat Banten dan pihak pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri (saat ini dialihkan atau diintegrasikan ke dalam struktur baru di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)) yang menyatakan bahwa aspirasi pembentukan daerah otonom baru tidak akan ditutup. Pernyataan di atas menjadi pemicu moral dan politik bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka secara lebih terbuka dan terorganisir. Dengan kondisi geografis yang luas dan potensi sumber daya yang besar, masyarakat Banten merasa bahwa hanya dengan membentuk provinsi sendiri mereka dapat menentukan arah pembangunan secara mandiri dan berkeadilan. Ketimpangan pembangunan yang mereka alami menjadi alasan kuat untuk memisahkan diri, bukan demi ambisi kekuasaan, tetapi demi kesejahteraan yang terpinggirkan.

Kedua organisasi itu dipimpin oleh dua tokoh asal Rangkasbitung, namun sejak awal terdapat ketidaksesuaian sikap di antara kedua ketuanya. Kemunculan dua organisasi besar ini, yang sama-sama mengklaim sebagai representasi perjuangan rakyat Banten, memunculkan ruang persaingan yang tak terhindarkan. Walaupun keduanya berangkat dari semangat yang sama, perbedaan latar belakang tokoh, basis dukungan, dan orientasi gerakan mulai menampakkan potensi friksi di antara mereka. Persaingan antara Pokja PPB dan KPPB tidak sekadar soal perbedaan organisasi, tetapi juga mencerminkan dinamika internal yang rumit dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten. Kedua kelompok itu memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda meskipun tujuannya yang sama.

Upaya untuk menyatukan kedua organisasi sempat dilakukan, namun ketegangan justru meningkat. KPPB menggelar Rapat Koordinasi pada 6–7 November 1999 di Islamic Center Serang tanpa mengundang Pokja-PPB. Rakor ini menghasilkan Buku Biru berisi visi, misi, rencana kerja, dan rekomendasi KPPB yang kemudian disampaikan ke berbagai lembaga, termasuk DPRD se-Karesidenan Banten, DPRD Jawa Barat, DPR-RI, dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Mansur, 2001: 162-173). Ketegangan mencapai puncaknya pada 27 November 1999, ketika Pokja-PPB mengadakan pertemuan di Rumah Makan Sari Kuring, Cilegon. Sejumlah tokoh penting hadir, termasuk anggota DPR-RI Ekky Syahruddin dan Tb. H. Farich Nahril. Pengurus KPPB awalnya tidak diundang, namun kemudian hadir atas saran tokoh senior. Dalam pertemuan tersebut, perbedaan pandangan memicu luapan emosi yang diwarnai insiden pecahnya gelas, sehingga delegasi KPPB memilih meninggalkan acara sebelum selesai (Lubis dkk., 2014: 329). Persaingan semakin tajam ketika KPPB dalam rekomendasinya menegaskan sebagai satu-satunya wadah perjuangan pembentukan Provinsi Banten, yang secara implisit menyingkirkan peran Pokja-PPB (Mansur, 2001: 147-148). Kedua kubu pun bersaing memperebutkan legitimasi publik dan pemerintah pusat. Menurut kubu Pokja-PPB, KPPB seharusnya berperan pada sosialisasi di tingkat akar rumput, sementara Pokja fokus pada persiapan sumber daya manusia dan alam. Namun di lapangan, perbedaan fungsi ini kabur dan yang tampak adalah rivalitas terbuka. Menyadari bahwa perpecahan dapat melemahkan gerakan, sejumlah tokoh seperti Tb. H. Farich Nahril, H. Mardini, dan Muchtar Mandala mengambil inisiatif mempertemukan kedua belah pihak. Setelah beberapa kali pertemuan di Hotel Arya Duta Jakarta, akhirnya Ketua KPPB H. Uwes Qorny bersedia bertemu dengan Ketua Pokja-PPB K.H. Irsyad Djuwaeli. Pertemuan rekonsiliasi berlangsung dalam suasana silaturahmi di Restoran Jepang Shima, Hotel Arya Duta Jakarta, dan berhasil meredakan ketegangan melalui kesepakatan kompromi (Mansur, 2001: 176). Langkah rekonsiliasi ini membuka jalan bagi pembentukan wadah bersama yang lebih inklusif. Melalui serangkaian pertemuan termasuk di Permata Hijau Jakarta dan Kampung Nyimas Ropoh (Mansur, 2001: 586), Pandeglang telah disepakati pembentukan Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPB), yang menghimpun semua unsur pergerakan di wilayah Banten dan sekitarnya, termasuk Pokja-PPB dan KPPB (Mardhotillah, 2016: 46-47). Kedua pihak menyadari bahwa cita-cita

bersama untuk mewujudkan Provinsi Banten hanya dapat dicapai melalui persatuan langkah.

Ketegangan Eksternal: Tarik-Menarik Kepentingan antara Elite Banten dan Elite Jawa Barat

Proses pembentukan Provinsi Banten tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal di kalangan elite lokal, tetapi juga diwarnai oleh ketegangan eksternal yang melibatkan tarik-menarik kepentingan antara elite Banten dan elite Jawa Barat. Bagi sebagian besar elite Jawa Barat, pemisahan Banten dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan potensi ekonomi provinsi induk. Sementara itu, bagi elite Banten, pemekaran dipandang sebagai langkah strategis untuk memperoleh kemandirian politik dan pengelolaan sumber daya daerah.

Keinginan masyarakat Banten untuk membentuk provinsi tersendiri memasuki tahap awal proses politik yang panjang. Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menyatakan bahwa aspirasi tersebut patut menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah, namun belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena harus melalui mekanisme formal mulai dari pembahasan di DPRD Tingkat I Jawa Barat hingga pengajuan resmi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat, melalui Mendagri, menempatkan posisi Banten sebagai daerah yang potensinya perlu diteliti lebih lanjut, terutama terkait parameter jumlah penduduk, luas wilayah, dan kekuatan sumber daya daerah. Syarwan mengakui bahwa Banten sudah memiliki potensi manusianya, tetapi menekankan perlunya verifikasi apakah potensi tersebut cukup kuat untuk memenuhi persyaratan pembentukan provinsi baru (PIN, 1999: 006). Pendekatan itu menunjukkan kehati-hatian pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan hubungan antara provinsi induk dan calon daerah otonom baru, sekaligus menghindari kesan bahwa keputusan pemekaran didorong oleh tekanan politik sepihak dari daerah. Di sisi lain, pernyataan Mendagri yang menolak anggapan bahwa keinginan pemisahan muncul karena kurangnya perhatian Pemerintah Jawa Barat memperlihatkan upaya untuk meredam narasi ketidakadilan pembangunan yang kerap disuarakan kelompok pro-pemekaran. Ia menyebut aspirasi tersebut sebagai hal yang "wajar-wajar saja," sehingga menempatkannya dalam kerangka diplomatis yang menghindari konfrontasi langsung antara pemerintah provinsi induk dan masyarakat Banten (PIN, 1999: 006).

Sikap hati-hati pemerintah pusat berjalan seiring dengan upaya elite Jawa Barat mempertahankan integritas wilayahnya. Ketua DPRD Jawa Barat Idin Rafioedin dan Gubernur HR Nuriana memang tidak menolak secara terbuka pembentukan Provinsi Banten, tetapi mensyaratkan proses demokratis, konstitusional, dan kajian objektif kemampuan Banten untuk mandiri. Mereka bahkan membentuk tim pengkaji dan pencari fakta sebagai mekanisme administratif yang berpotensi memperlambat proses pemekaran (NAR/PIN, 2000: 018). Namun, tidak semua elite Jawa Barat bersikap kompromis, Wakil Gubernur Husein Jachjasaputra menolak secara substansial dengan menilai pembentukan provinsi baru "sudah bukan zamannya lagi" di era otonomi daerah, serta menekankan

ketergantungan fiskal sebagian wilayah Banten pada subsidi provinsi induk. Pandangan itu kontras dengan narasi ketidakadilan pembangunan yang diusung elite Banten, yang menuduh pemerintah provinsi terlalu *Priangan-sentris* dan meminggirkan wilayah mereka (NAR/PIN, 2000: 018).

Kondisi tersebut memperjelas bahwa tarik-menarik kepentingan antara elite Banten dan elite Jawa Barat tidak hanya melibatkan perbedaan pandangan teknis mengenai kelayakan pemekaran, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Pemerintah pusat yang bersikap hati-hati serta elite Jawa Barat yang memanfaatkan prosedur administratif menjadi faktor penghambat, sementara elite Banten berupaya mencari jalur alternatif melalui lobi politik di tingkat nasional.

Dari perspektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, wacana pemekaran Banten disikapi dengan kehati-hatian yang cenderung defensif. Secara formal, pejabat Jawa Barat menyatakan tidak menolak, namun menegaskan perlunya kajian rasional dan kesiapan daerah (NAR/PIN, 2000: 018). Argumen bahwa otonomi daerah menempatkan kabupaten/kota sebagai ujung tombak pembangunan kerap digunakan untuk mempertanyakan urgensi pembentukan provinsi baru. Di balik bahasa teknokratis tersebut, tersirat kekhawatiran akan hilangnya wilayah strategis serta sumber pendapatan penting. Ketergantungan fiskal Lebak dan Pandeglang terhadap subsidi pemerintah pusat dan Jawa Barat kemudian dijadikan dasar untuk menilai bahwa Banten belum sepenuhnya siap berdiri sendiri (NAR/PIN, 2000: 018). Sikap tersebut justru memperjelas bahwa isu pemekaran Banten tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik ekonomi wilayah. Pernyataan Tb. Chasan Sochib yang mengibaratkan Banten sebagai "istri cantik" yang enggan dilepas Jawa Barat menjadi ungkapan yang gamblang tentang potensi ekonomi Banten dipandang sebagai aset berharga (GUN/MUL, 2000: 018).

Di sisi lain, hasil kajian Bappeda Jawa Barat yang menyatakan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Banten memicu kemarahan masyarakat Banten. Masyarakat Banten menilai hasil kajian Bappeda tersebut merupakan instrumen politik yang dipesan oleh Gubernur Jawa Barat dengan tujuan menghambat terealisasinya aspirasi pembentukan Provinsi Banten (Rohmah, 2018: 93). Faktor historis juga turut memperuncing ketegangan. Sejak masa Kesultanan Banten yang menumbangkan kekuasaan Kerajaan Sunda, hubungan kedua wilayah telah diwarnai rivalitas politik dan identitas. Perbedaan etnik diperkuat oleh praktik diskriminasi jabatan strategis yang didominasi pejabat asal Priyangan memperkuat perasaan termarjinalisasi di kalangan masyarakat Banten.

Selain faktor ekonomi, elite Jawa Barat juga mempersoalkan kelayakan Banten sebagai provinsi. Ketegangan terjadi ketika hasil kajian sejarah Banten yang dinilai telah dimanipulasi oleh Pemda Jawa Barat memicu kemarahan masyarakat Banten, yang menilai laporan tersebut sebagai bentuk pesanan politik dari Gubernur Jawa Barat untuk menghambat aspirasi pemekaran. Dalam perspektif sejarah, hubungan Banten dan Jawa Barat telah lama diwarnai rivalitas sejak berdirinya Kesultanan Banten yang menumbangkan kekuasaan Kerajaan Sunda. Sementara itu, perbedaan identitas etnik yang diperkuat oleh praktik diskriminasi jabatan strategis di birokrasi yang didominasi

pejabat asal Priyangan yang mendorong munculnya perasaan termarjinalisasi di kalangan masyarakat Banten (Lubis dkk., 2014: 305).

Faktor politik juga tidak kalah signifikan. Pergulatan elite politik Jawa Barat dengan sejumlah tokoh masyarakat Sunda yang mana elite politik Jawa Barat menghendaki agar keutuhan wilayah Jawa Barat tetap terjaga. Di sisi lain, elite Banten memanfaatkan momentum Reformasi 1998 untuk melakukan lobi politik langsung ke DPR RI, menghindari jalur eksekutif yang dianggap akan terhambat oleh penolakan Jawa Barat. Strategi tersebut terbukti efektif, karena DPR RI melalui inisiatifnya membentuk Panitia Khusus Pembentukan Provinsi Banten meskipun tanpa persetujuan penuh dari pemerintah provinsi induk. Faktor politik semakin memperumit situasi saat elite Jawa Barat menolak pemisahan wilayah itu. Sementara itu, elite Banten memanfaatkan momentum Reformasi 1998 untuk mengubah strategi perjuangan dari jalur eksekutif yang dianggap akan terhambat, menuju jalur legislatif melalui DPR RI. Upaya lobi yang ditempuh oleh elite Banten kepada elite politik di DPR dipandang sebagai strategi yang efektif untuk mendorong pengajuan RUU inisiatif DPR terkait pembentukan Provinsi Banten (Rohmah, 2018: 101). Strategi itu berhasil dengan terbentuknya Panitia Khusus Pembentukan Provinsi Banten.

Aspirasi pembentukan Provinsi Banten semakin menguat pada awal tahun 2000, bahkan diiringi dengan sikap tegas sebagian tokoh lokal untuk mengabaikan peran DPRD Jawa Barat jika dianggap menghambat proses. Ketua Forum Pemuda Balaraja (Formula), Saeful Rizal menegaskan bahwa usulan pembentukan provinsi dapat langsung diajukan ke DPR RI melalui hak inisiatif legislatif, tanpa persetujuan DPRD Jawa Barat. Ia bahkan optimistis Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten dapat disahkan pada Maret 2000 (GUN/MUL, 2000: 018). Pandangan serupa disampaikan oleh tokoh pemuda lain seperti Dedy Kurniadi dan Fachrurodji, yang menggarisbawahi bahwa rencana pemekaran telah disusun secara terperinci dalam *Buku Putih* oleh Forum Masyarakat Tangerang untuk Provinsi Banten (Formatang). Hal itu menunjukkan bahwa strategi elite Banten mulai bergeser dari jalur administratif di tingkat provinsi induk menuju jalur politik di tingkat nasional, sebagai respons terhadap potensi penolakan dari DPRD Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Pendekar Banten, H. Tb. Chassan Sochib, menunjukkan keyakinan bahwa DPRD Jawa Barat pada akhirnya akan menyetujui pemekaran. Ia mengibaratkan posisi Banten bagi Jawa Barat sebagai "istri cantik" yang sulit dilepaskan, karena memiliki potensi ekonomi besar meskipun masih terdapat wilayah tertinggal. Analogi tersebut menggambarkan persepsi elite Banten bahwa penolakan Jawa Barat berakar pada kekhawatiran kehilangan sumber daya strategis. Menanggapi tudingan bahwa pemekaran hanya ambisi segelintir elite untuk memperoleh jabatan, Sochib menolak keras. Ia menegaskan bahwa keterlibatannya didasari tanggung jawab moral sebagai generasi 1945 untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Banten, dengan menambahkan alasan historis bahwa Banten pernah jaya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa dan mampu menjalin hubungan dagang internasional (GUN/MUL, 2000: 018). Rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan pola kausalitas yang jelas: kekhawatiran akan penolakan dari elite Jawa Barat mendorong elite Banten mengalihkan fokus

perjuangan ke tingkat nasional dan memanfaatkan hak inisiatif DPR RI untuk memotong hambatan administratif di provinsi induk. Di sisi lain, narasi historis dan potensi ekonomi terus diangkat untuk mengukuhkan legitimasi politik pemekaran, sekaligus menepis tudingan bahwa gerakan tersebut sekadar motif kekuasaan pribadi. Dengan demikian, tarik-menarik kepentingan antara elite Banten dan elite Jawa Barat tidak hanya berakar pada perbedaan pandangan mengenai kelayakan pemekaran, tetapi juga dilandasi oleh kekhawatiran kehilangan sumber daya ekonomi, warisan rivalitas historis, perbedaan identitas etnik, dan perbedaan orientasi politik. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menjadikan proses legislasi pembentukan Provinsi Banten sarat dengan ketegangan diplomatis dan manuver politik di berbagai tingkatan pemerintahan.

Proses legislasi pembentukan Provinsi Banten diwarnai ketegangan antara elite Banten dan elite Jawa Barat, yang berakar pada perbedaan kepentingan politik dan pertimbangan ekonomi. DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Banten pada awal tahun 2000. Namun, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi mengingatkan agar pembentukan provinsi baru tidak dilakukan tergesa-gesa, serta perlu mempertimbangkan sikap pemerintah daerah dan DPRD Jawa Barat sebagai provinsi induk. Salah satu alasannya adalah kewajiban Jawa Barat untuk ikut membiayai masa transisi provinsi baru, yang dikhawatirkan akan membebani APBD provinsi induk (TRA, 2000: 006). Ketegangan meningkat saat RUU mencantumkan kewajiban Jawa Barat memberikan subsidi kepada Banten selama masa transisi. Gubernur HR Nuriana dan Pansus DPRD Jawa Barat secara tegas menolak skema tersebut, dengan alasan dana transisi seharusnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Mereka berargumen bahwa Jawa Barat tidak memungut retribusi dari wilayah Banten, sehingga penyaluran subsidi justru akan mengurangi porsi anggaran bagi kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Bagi elite Banten, penolakan itu dipandang sebagai indikasi bahwa Jawa Barat berusaha melepas diri dari tanggung jawab historis dan politik terhadap wilayah Banten (PIN, 2000: 022). Sikap ambigu Gubernur Nuriana yang menyatakan "setuju secara prinsip" namun enggan mengambil keputusan tegas karena keterbatasan kewenangan yang mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 semakin menambah friksi politik. Anggota Pansus DPR, Idrus Mahram, menilai gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan catatan pertimbangan. Ketidakjelasan sikap tersebut memperkuat persepsi di kalangan elite Banten bahwa pemerintah provinsi induk tidak memiliki komitmen penuh terhadap aspirasi pemekaran (PIN, 2000: 022).

Meski penuh tarik ulur, DPRD Jawa Barat akhirnya menyetujui pemisahan Banten melalui sidang paripurna pada 5 April 2000. Namun, persetujuan tersebut disertai syarat tambahan, seperti pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan penyerahan modal pangkal kepada pemerintah pusat. Persyaratan itu menuai kritik keras dari tokoh-tokoh Banten, seperti KH Djunaidi dan H. Djajudi, yang menilai syarat tersebut hanya akan memperlambat proses pembentukan provinsi. Bagi masyarakat Banten, yang terpenting adalah restu politik dari DPRD Jawa Barat, sementara teknis pelaksanaan dapat ditentukan oleh DPR RI (PIN, 2000b: 024). Dinamika itu

menunjukkan bahwa penolakan elite Jawa Barat tidak dilakukan secara frontal, tetapi dibungkus dalam mekanisme administratif dan syarat prosedural. Bagi elite Banten, hambatan tersebut mendorong mereka untuk memperkuat lobi politik di tingkat nasional, memanfaatkan hak inisiatif DPR RI untuk meminimalisasi kendala di tingkat provinsi induk. Langkah itu membuahkan hasil ketika pada 4 Oktober 2000, Pansus DPR bersama pemerintah menyetujui RUU Pembentukan Provinsi Banten untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang (pep, 2000: 006). Pengesahan tersebut disambut gegap gempita ribuan warga Banten yang hadir di Gedung DPR/MPR, disertai atraksi budaya dan orasi mahasiswa. Menteri Dalam Negeri Surjadi Soedirdja, yang juga putra daerah Banten, menegaskan bahwa provinsi ke-30 itu tidak boleh hanya menjadi struktur administratif baru, tetapi harus benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat (pep, 2000b: 006). Dengan demikian, ketegangan eksternal yang berlangsung sejak awal tahun berakhir dengan kemenangan politik bagi elite Banten, meski disertai tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa pemekaran benar-benar membawa kemajuan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Banten pada periode 1998–2000 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil tuntutan administratif daerah, melainkan sebagai hasil dari perubahan struktur politik nasional pasca-Reformasi 1998 yang membuka peluang politik baru bagi aktor-aktor lokal. Sebelum Reformasi, tuntutan pembentukan Provinsi Banten yang telah berkembang sejak 1953 mengalami stagnasi akibat kuatnya sentralisasi kekuasaan Orde Baru, terbatasnya kebijakan pemekaran wilayah, serta dominasi negara dalam mengendalikan ruang politik daerah. Dalam struktur politik yang tertutup tersebut, aspirasi masyarakat Banten tetap bertahan sebagai kesadaran kolektif historis, tetapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk berkembang menjadi agenda politik nasional.

Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998 menjadi titik balik yang mengubah hubungan antara negara dan daerah. Reformasi tidak hanya melemahkan kontrol politik pusat, tetapi juga menghadirkan kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Perubahan struktur politik tersebut menciptakan *political opportunity* yang memungkinkan berbagai aktor lokal di Banten, mulai dari mahasiswa, ulama, tokoh masyarakat, jawara, hingga elite politik daerah kembali menghidupkan tuntutan pembentukan provinsi melalui jalur politik dan konstitusional.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Provinsi Banten memperlihatkan bahwa Reformasi menjadi elemen kunci yang memungkinkan transformasi aspirasi lokal menjadi kebijakan negara. Peluang politik yang terbuka pasca-Reformasi dimanfaatkan oleh elite Banten melalui berbagai strategi, seperti mobilisasi massa, konsolidasi organisasi, diplomasi politik dengan pemerintah pusat, hingga lobi melalui DPR RI. Perubahan strategi perjuangan dari jalur administratif menuju jalur legislatif

menunjukkan kemampuan elite lokal dalam membaca perubahan struktur kekuasaan nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembentukan Provinsi Banten tidak hanya ditentukan oleh kuatnya identitas lokal atau ketimpangan pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan elite lokal memanfaatkan momentum Reformasi untuk memperoleh legitimasi politik di tingkat nasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pembentukan Provinsi Banten berlangsung melalui dinamika kontestasi elite yang kompleks. Kontestasi internal terlihat dari persaingan antara Pokja-PPB dan KPPB dalam memperebutkan legitimasi sebagai representasi utama perjuangan masyarakat Banten. Meskipun kedua organisasi tersebut sama-sama memperjuangkan pembentukan provinsi, terdapat perbedaan strategi, kepemimpinan, dan basis dukungan yang memunculkan ketegangan sehingga sempat menghambat konsolidasi gerakan. Namun, ancaman bahwa konflik internal dapat melemahkan perjuangan akhirnya mendorong munculnya rekonsiliasi politik melalui pembentukan Bakor-PPB sebagai wadah bersama. Kontestasi eksternal terjadi antara elite Banten dan elite Jawa Barat. Penolakan dan sikap hati-hati Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperlihatkan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut perebutan sumber daya ekonomi, pengaruh politik, dan kontrol wilayah. Kekhawatiran Jawa Barat terhadap hilangnya wilayah strategis dan potensi ekonomi Banten mendorong munculnya berbagai hambatan administratif dan politik dalam proses legislasi. Kondisi tersebut menyebabkan elite Banten mengalihkan strategi perjuangan ke tingkat nasional dengan memanfaatkan hak inisiatif DPR RI untuk mempercepat pembentukan provinsi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Banten merupakan hasil interaksi antara perubahan struktur politik nasional dan kemampuan aktor lokal memanfaatkan peluang politik yang muncul pada masa Reformasi. Reformasi 1998 berhasil menghapus hambatan politik yang sebelumnya membatasi gerakan daerah, sekaligus membuka ruang bagi elite lokal untuk berperan sebagai agen perubahan dalam proses transisi dari sistem sentralistik menuju desentralistik. Oleh karena itu, terbentuknya Provinsi Banten tidak hanya mencerminkan keberhasilan perjuangan masyarakat daerah, tetapi juga menunjukkan perubahan struktur politik nasional dapat melahirkan konfigurasi kekuasaan baru di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Ant. (1970, Oktober 17). Mendjeladjah nusantara: Pemuda2 Pandeglang Menolak ‘Propinsi Banten.’ *Kompas*, 2.

Chipkin, I., & Vidojević, J. (2025). Elite Contestation in South Africa, 2006–2018: The Making and Unmaking of a Power Elite. *Journal of Southern African Studies*, *51*(5), 643–660. https://doi.org/10.1080/03057070.2026.2626233

Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya (25). (1994, November 8). *Berita Yudha*, 4.

Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah TR - Diterjemahkan Oleh Nugroho Notosusanto*. Universitas Indonesia (UI-Press).

GUN/MUL. (2000, Februari 4). Pembentukan Propinsi Banten: Tak Perlu Persetujuan DPRD Jabar. *Kompas*, 018.

Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah* (Edisi Revisi 2020). Satya Historika.

Hidayat, S. (2007). "Shadow State"? Business and Politics in the Province of Banten. Dalam H. S. Nordholt & G. van Klinken (Ed.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia* (hlm. 203–224). KITLV Press.

Jami, W. A., & Peoples, C. (2022). Political opportunity, democracy, and 40 years of protest, 1981–2020: A cross-national analysis. *Social Science Quarterly*, *103*(6), 1440–1458. https://doi.org/10.1111/ssqu.13202

Karim, M. (1999, September 6). Banten Ingin Jadi Propinsi Sendiri. *Kompas*, 016.

Lubis, N. H., Ali, M., Saringendyanti, E., Falah, M., & Suwardi, B. (2014). *Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban*. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.

Mahasiswa Tuntut Soeharto Diadili - Mencopot Mandat. (1998, Mei 22). *Bali Post*, 1–11.

Mansur, K. (2001). *Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi: Catatan Kesaksian Seorang Wartawan*. Antara Pustaka Utama.

Mardhotillah, D. (2016). *Upaya Melepaskan Diri dari Induk: Pembentukan Provinsi Banten 1963-2001* [Skripsi]. Universitas Indonesia.

Mizruchi, M. S. (2017). The Power Elite in historical context: a reevaluation of Mills's thesis, then and now. *Theory and Society*, *46*(2), 95–116. https://doi.org/10.1007/s11186-017-9284-4

Mulyana, Y., & dkk. (2009). *Meretas Kemandirian: Perjuangan Panjang Rakyat Banten Menuju Provinsi*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

NAR/PIN. (2000, Februari 3). Pembentukan Propinsi Banten: Niat Baik Jangan jadi Bumerang . *Kompas*, 018.

pep. (2000a, Oktober 4). Selangkah Lagi Banten Jadi Provinsi. *Kompas*, 006.

pep. (2000b, Oktober 5). Surjadi Soedirdja: Pjs Gubernur Banten Paling Lambat Maret 2001. *Kompas*, 006.

PIN. (1999, Agustus 7). Propinsi Banten Belum Bisa Diwujudkan. *Kompas*, 006.

PIN. (2000a, Maret 21). Banten Dipastikan Lepas dari Jabar. *Kompas*, 022.

PIN. (2000b, April 7). DPRD Jabar Setuju Banten Dilepas. *Kompas*, 024.

Pranoto, S. W. (2014). *Teori & Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.

Proporsional dalam Tuntutan Reformasi. (1998, Mei 20). *Bali Post*, 5.

Ribawati, E., Rahmat, A., & Fadillah, A. (2023). PERANAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN TAHUN 1999—2000. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, *3*(2), 414–432. https://doi.org/10.30998/je.v3i2.1759

Rohmah, N. S. (2018). ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN. *CosmoGov*, *4*(2), 173. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16133

Sudirman, A. (1968, Juli 22). Mendjeladjah Nusantara: Banten Ingin djadi Propinsi. *Kompas*, 2.

Suganda, H. (1999a, Juli 5). Banten Kelak Hanya Desa Kecil. *Kompas*, 024.

Suganda, H. (1999b, Juli 5). Banten Menggeliat. *Kompas*, 023.

Suparno, B. Agus. (2012). *Reformasi & jatuhnya Soeharto*. Penerbit Buku Kompas.

Supriatna, E., & Ilyas, T. (1999, Oktober 4). Catatan Kecil dari Munculnya Keinginan Wilayah Banten Jadi Provinsi (Bagian I): Debus, Dubes, Pesantren dan Kejayaan Masa Lalu. *Pikiran Rakyat*.

Toscano, M., & Stolz, S. A. (2025). Reconsidering the Notion of Social Justice from an Elite Theory Perspective. *British Journal of Educational Studies*, *73*(3), 345–366. https://doi.org/10.1080/00071005.2024.2415621

TRA. (2000, Februari 22). Soal RUU Inisiatif Propinsi Banten: Jangan Terburu-Buru Bentuk Propinsi . *Kompas*, 006.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Legislation 22, Lembaga Negara Republik Indonesia (1999).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, Legislation 23, Lembaga Negara Republik Indonesia (2000).

Wawancara dengan Embay Mulya Syarief. (2026).

Wawancara dengan Makmun Muzakki. (2026).

YNS. (1999, September 13). Digulirkan, Deklarasi Propinsi Banten. *Kompas*, 015.